

Reg. No. 320139200115.

ASPEK HUKUM LEASING PESAWAT UDARA DI INDONESIA

(SUATU STUDI KASUS)

TESIS

Disusun Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Oleh :

SRI BAKTI YUNARI
Nim : 207 93 0011
Nirm : 933115010260044



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JA KARTA
1997

ASPEK HUKUM LEASING PESAWAT UDARA DI INDONESIA

(SUATU STUDI KASUS)

TESIS

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara
Dengan Konsentrasi Hukum Ekonomi

Disusun Oleh :

SRI BAKTI YUNARI

Nim : 207 93 0011
Nirm : 933115010260044

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
J A K A R T A
1 9 9 7**

HALAMAN PENGESAHAN

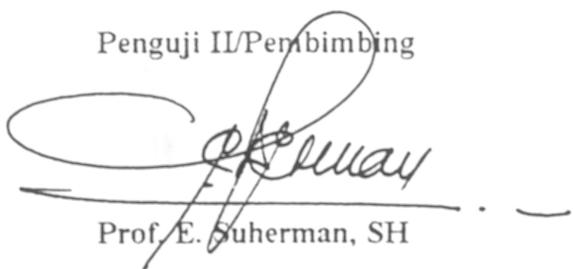
Tesis yang berjudul : "ASPEK HUKUM LEASING PESAWAT UDARA DI INDONESIA", ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji tesis Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 1997, yang terdiri dari :

Ketua Sidang/Pengaji I



Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH

Pengaji II/Pembimbing



Prof. E. Suherman, SH

Pengaji III



Prof. Dr. Erman Rajagukguk, SH, LLM

Sekretaris Sidang



Drs. Gunawan Djajaputra, SH, MH, CN.

Tesis ini disahkan pada hari Selasa, tanggal : 25 Maret 1997.

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Tarumanagara



Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, ML



ABSTRAK

Demi menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penerbangan dan angkutan udara secara nasional maupun Internasional, khususnya penerbangan yang bersifat komersil, maka modal utama yang diperlukan bagi suatu perusahaan angkutan udara adalah pesawat udara. Mengingat tingginya harga pesawat udara tersebut, biasanya perusahaan penerbangan dalam proses pengadaan pesawatnya tidak membeli secara tunai, akan tetapi menggunakan cara lain yaitu leasing. Cara tersebut dinilai efektif karena tidak menimbulkan beban pajak yang memberatkan pemerintah. Pelaksanaan leasing pesawat udara di Indonesia, telah diatur oleh Keputusan Presiden No 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang disertai dengan peraturan pelaksana berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/kmk.013/1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam prakteknya, pendaftaran pesawat udara yang diperoleh dengan cara leasing serta status kepemilikan pesawat udara yang diperoleh dengan cara leasing tersebut di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) sub (b) Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan, sedangkan syarat-syarat dan tata caranya diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.78/AU.001/PHB-86. PT. PANN MULTI FINANCE, sebagai satu-satunya BUMN yang bertindak sebagai lessor di Indonesia meyelenggarakan berbagai bentuk perjanjian leasing pesawat udara, diantaranya Operational Leasing, Financial Leasing, dan Sale and Lease Back. Dari beberapa bentuk perjanjian leasing pesawat udara tersebut, maka bentuk perjanjian yang paling banyak dilakukan oleh lessee dan lessor di Indonesia adalah Operational Leasing. Dan jika terjadi perselisihan diantara para pihak, yang berlaku adalah ketentuan dari UNIDROIT 1987 yang belum diratifikasi oleh Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya tulisan ini dapat diselesaikan. Tulisan ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Adapun Judul thesis yang dipilih adalah "ASPEK HUKUM LEASING PESAWAT UDARA DI INDONESIA" (Suatu Studi Kasus). Dalam thesis ini dilihat aspek Hukum Perdata, dan aspek Hukum Perdata Internasionalnya. Terutama mengenai ketentuan, Mekanisme, bentuk perjanjian serta perkembangan leasing pesawat udara di Indonesia.

Oleh karena itu tulisan ini mencoba untuk melakukan penelusuran peraturan, pembahasan perjanjian dan tata cara pendaftaran pesawat udara yang diperoleh dengan cara leasing serta contoh kasus perjanjian leasing pesawat udara dalam prakteknya.

Sebagaimana kehidupan ini, bahwa tidak ada gading yang tak retak, tulisan ini penulis yakin masih banyak kelemahan bahkan mungkin kekurangannya. Sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis haturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. E. Suherman SH, yang telah bersedia memberi bimbingan dan pengarahan ditengah kesibukan beliau;
2. Prof. Arifin Suriaatmadja SH, selaku Ketua Program Pascasarjana Bidang studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan banyak bantuan, beserta staf.
3. DR. Valerine Kierkhoff SH, yang telah memberikan pengarahan Metodologi penelitian thesis ini.
4. Prof. DR. Loeby Loekman SH, yang telah memberikan masukan.
5. Endar Pulungan SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat menempuh pendidikan pascasarjana.
6. Wahyu Satrio Utomo SH, selaku Kabag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Perhubungan, beserta staf.
7. Jimmy Tombukan SH, di Biro Hukum PT. Garuda Indonesia, beserta staf.

8. Budi Purwanto, SH, dan Drs. Bambang Sudaryono di Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Perhubungan.
9. Fardinan Kenedy SH, selaku kepala seksi perjanjian jasa Merpati Nusantara, beserta staf.
10. Seluruh keluarga dan Ibu tercinta yang telah memacu untuk menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin.
11. Rekan-rekan dilingkup Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik materiil maupun spirituial.

Jakarta, Januari 1997.

Penulis.



DAFTAR ISI

Hal.

Kata Pengantar	ii
----------------------	----

Daftar Isi	v
------------------	---

Abstrak	vii
---------------	-----

BAB I : PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Kerangka Teori	17
G. Definisi Operasional	17

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN.

A. Sejarah Dan Perkembangan Leasing Pesawat Udara	22
B. Pengertian Leasing Pesawat Udara.	
1. Pengertian Leasing	31
2. Perbedaan Leasing dengan Perjanjian Lainnya	40
3. Ciri-Ciri Leasing	47
4. Pengertian Leasing Pesawat Udara	49
C. Landasan Yuridis Leasing Pesawat Udara..	59
D. Jenis-Jenis Leasing Pesawat Udara.....	67
E. Keuntungan dan Kerugian Leasing Pesawat Udara	77

BAB III : PELAKSANAAN LEASING PESAWAT UDARA DI INDONESIA.

A. Jenis-Jenis Transaksi Leasing Pesawat Udara di dalam Praktek	86
B. Mekanisme Leasing Pesawat Udara dalam Praktek	90
C. Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara Yang Diperoleh Dengan Cara Leasing di Indo- nesia	94
D. Pelaksanaan Leasing Pesawat Udara di PT. Garuda Indonesia	104
E. Pelaksanaan Leasing Pesawat Udara di PT. Merpati Nusantara Airlines	113

BAB IV : STUDI KASUS DAN ANALISIS.

A. Studi Kasus Tentang Perjanjian Leasing Dengan Hak Opsi Untuk Membeli (Finance Lease) Pesawat Udara Antara PT. PANN MULTI FINANCE dengan PT. MNA	119
B. Analisis Hasil Penelitian.	
1. Dari Segi Pelaksanaannya	135
2. Hukum Yang Berlaku Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Leasing Pesawat Udara Internasional	139
3. Status Kepemilikan Pesawat Udara Yang Diperoleh Dengan Cara Leasing	140

BAB V : PENUTUP.

A. Kesimpulan	146
B. Saran-Saran	150

DAFTAR PUSTAKA	151
----------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

